



EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL DAERAH TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI (Studi Kasus Propinsi Sulawesi Selatan)

Akhmad

Dosen Kopertis Wil. IX Sulawesi Dipekerjakan pada STIE-YPUP Makassar dan Alumni Ilmu Ekonomi Pertanian IPB (Email: akhmad09@yahoo.co.id)

Bustang

Perencana Madya Kement. PPN/Bappenas dan Ketua Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) Komisariat Kement. PPN/Bappenas.

Abstrak

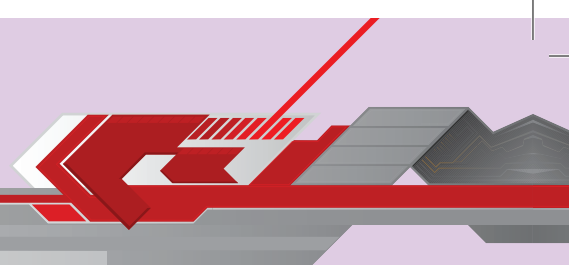
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan fiskal terutama pengeluaran pemerintah daerah terhadap perekonomian kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data panel 23 kabupaten dan kota tahun 2006-2011. Penelitian ini menggunakan model analisis salib sumbu, dan *Pearson correlation*. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan rata-rata pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Di samping itu pertumbuhan rata-rata pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap angka pengangguran dan kemiskinan. Pada sisi lain pertumbuhan rata-rata produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh

negatif, namun tidak nyata terhadap kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan belum berkualitas, dalam arti bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada masih lebih bertumpuh pada golongan menengah dan atas.

Keywords: Fiscal policy - Autonomous Region - Economic performance

PENDAHULUAN

Setelah Undang-Undang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diimplementasikan pada tahun 2001, pelaksanaan pembangunan di daerah memiliki peran



yang semakin penting dan bahkan menjadi ujung tombak bagi keberhasilan pembangunan nasional. Perluasan kewenangan daerah dalam merencanakan dan mengalokasikan dana untuk membiayai berbagai kegiatan, memberikan peluang yang lebih besar bagi setiap daerah untuk melaksanakan aktivitas pembangunan sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan memilih sektor-sektor ekonomi secara lebih selektif sebagai sektor unggulan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang optimal berbasis potensi sumber daya lokal pada berbagai daerah, secara simultan pada gilirannya akan menghasikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara agregat di tingkat nasional.

Rasyid (1998), Simanjuntak (2002) mengatakan desentralisasi fiskal di Indonesia mempunyai beberapa sasaran umum yaitu (1) untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber keuangan negara, (2) mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, (3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, (4) mengurangi ketimpangan antar daerah, (5) menjamin terselenggaranya pelayanan publik, dan (6) meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Desentralisasi fiskal ditandai dengan meningkatnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (dana perimbangan), berupa: (1) peningkatan persentase dana bagi hasil (DBH) untuk pemerintah daerah, (2) peningkatan dana alokasi umum (DAU) yang sebelumnya dikenal dengan subsidi daerah otonom dan instruksi presiden, dan (3) pelimpahan dana alokasi khusus (DAK).

Tantangan utama dalam pembangunan Indonesia dewasa ini, bukan lagi untuk memberikan dana kepada daerah-daerah yang lebih miskin, tetapi bagaimana memastikan agar daerah-daerah tersebut menggunakan dana yang disalurkan dengan sebaik-baiknya. Sumber dana terpenting untuk daerah adalah dana alokasi umum (DAU) mengalami peningkatan hingga 64 persen pada tahun 2006, (World Bank, 2007).

Kewenangan yang dimiliki oleh daerah dengan desentralisasi fiskal, maka daerah dapat menanggapi dengan dua hal yang berbeda yaitu: (1) lebih memusatkan perhatian pada usaha memperbesar penerimaan, melalui intensifikasi dan perluasan pungutan pajak, retribusi daerah, serta pemanfaatan sumberdaya yang belum optimal melalui bagi hasil, atau (2) lebih berorientasi pada peningkatan efektivitas sisi pengeluaran, melalui usaha menstimulasi dunia

usaha, dengan pengembangan iklim usaha yang lebih baik bagi daerahnya.

Tantangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di satu sisi, akan berdampak pada peningkatan biaya produksi yang dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economic*), yang selanjutnya berdampak pada produksi, dan mengganggu iklim usaha. Dampak selanjutnya dapat menurunkan investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja.

Susiyati (2007) mengemukakan sebagian daerah berkeinginan untuk meningkatkan peran pendapatan asli daerahnya, sebagai refleksi otonomi fiskal mereka. Namun karena kurangnya pemahaman akan prinsip-prinsip perpajakan yang baik, maka banyak upaya yang mereka lakukan justru mengganggu (distorsi) terhadap aktivitas perekonomian daerah tersebut, dan juga terhadap perekonomian kawasan secara keseluruhan. Berbagai pungutan-pungutan yang dilakukan daerah justru mengganggu iklim investasi dan dunia usaha di daerah.

Provinsi Sulawesi Selatan adalah provinsi yang terletak di sebelah selatan Pulau Sulawesi dengan luas daratan 45 519.24 km persegi, meliputi 20 kabupaten dan 3 kota serta 263 kecamatan. Topografi Provinsi Sulawesi Selatan membentang mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi, wilayah daratan ini dikelilingi oleh laut, di sebelah selatan terdapat Laut Flores, di sebelah barat terdapat Selat Makassar, dan di sebelah timur terdapat Teluk Bone, serta pulau-pulau tersebar pada perairan tersebut.

Potensi wilayah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di jalur pembangunan sumberdaya di kawasan timur Indonesia, antara Pulau Kalimantan dan Pulau Papua membuka peluang bagi kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk dapat memainkan perannya secara maksimal sebagai pusat pembangunan dan pertumbuhan di kawasan timur Indonesia.

Kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan sangat diharapkan akan menjadi acuan dalam pembangunan di wilayah timur Indonesia, yang membuka jalan baik untuk pembangunan wilayah maupun ruang. Pengembangan sumberdaya kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada berbagai isu yang perlu ditangani secara terpadu, berdasarkan potensi dan kondisi kabupaten kota, berdasarkan pada sumberdaya alam, perlu lebih dipromosikan demi perluasan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan (Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, 2007).

Kondisi perekonomian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dewasa ini masih didominasi oleh sektor pertanian, karena menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk. Pada tahun 2011 tenaga kerja yang terserap pada sektor pertanian sebesar 43,53 persen, dan penyumbang terbesar terhadap PDRB yaitu 25,32 persen. Oleh karena itu sektor pertanian perlu mendapat perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan Pemerintah daerah Sulawesi Selatan.

Melalui otonomi daerah, maka pemerintah kabupaten kota, di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu mengelola kebijakan fiskalnya dengan baik, agar dapat mendorong pembangunan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan secara berkelanjutan.

Tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam otonomi daerah dewasa ini, adalah bagaimana membangun daerahnya dengan sumberdaya yang dimilikinya. Mengingat keterbatasan anggaran yang dimilikinya, maka pemerintah daerah harus mampu menarik investasi swasta, dalam mengembangkan daerahnya dengan baik sesuai potensi dan sumberdaya manusia yang dimilikinya, untuk dapat memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi, mengingat kondisi perekonomian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dewasa ini: (1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita rendah, (2) tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi, (3) tingkat kemiskinan yang masih tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk mengkaji tentang efektivitas kebijakan fiskal terutama pengeluaran pemerintah daerah terhadap perekonomian kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tinjauan Teoritis

Kebijakan fiskal adalah bentuk tindakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, dengan tujuan agar perekonomian tidak terlalu menyimpang dari keadaan yang diinginkan dengan alat (*policy instrument variable*) berupa pajak (T), transfer pemerintah (Tr), dan pengeluaran pemerintah (G) sebagai *levels of spending and taxation* (Romer, 2001; Samuelson dan Nordhaus, 2005). Kebijakan fiskal disebut juga kebijakan anggaran (*budgetary policy*) yang dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), (Muhammad, 2004).

Kebijakan fiskal atau anggaran memiliki tiga fungsi yaitu, (1) fungsi alokasi (*allocation function*), (2) fungsi distribusi (*distribution function*), dan (3) fungsi stabilisasi (*stabilization function*). Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang sosial (*social goods*), atau proses penggunaan sumberdaya keseluruhan yang dibagi di antara barang privat (*private goods*), dan barang sosial (*social goods*) serta kombinasi barang sosial yang dipilih. Fungsi distribusi berkaitan dengan pembagian pendapatan dan kekayaan yang lebih adil dan merata kepada masyarakat. Sedangkan fungsi stabilisasi untuk mempertahankan tingkat pekerjaan yang tinggi (*high employment*), stabilitas tingkat harga-harga, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sesuai, serta berpengaruh pada neraca perdagangan dan pembayaran, (Musgrave, 1991; Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2010).

Instrumen kebijakan fiskal adalah variabel belanja pemerintah (G) atau pajak (T), bersama-sama dengan variabel konsumsi masyarakat (C), Investasi Swasta (I) dan net ekspor (X-M), merupakan komponen yang mempengaruhi output atau pendapatan nasional (Y). Dalam keseimbangan makro ekonomi dirumuskan:

$$Y = C + I + G + (X-M) \dots\dots\dots (3.5)$$

Sementara itu Cullis dan Jones, (1992) mengatakan bahwa instrumen kebijakan fiskal yang dapat dilakukan oleh pemerintah terdiri atas instrumen belanja pemerintah dan pajak. Kedua jenis instrumen ini secara langsung berpengaruh kepada sektor riil, dalam hal ini mempengaruhi pengeluaran agregat yang berdampak pada permintaan agregat. Kebijakan belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap permintaan agregat dan pendapatan nasional. Sementara kebijakan pajak berpengaruh negatif terhadap permintaan agregat dan pendapatan nasional. Besarnya pengaruh kedua kebijakan tersebut ditentukan oleh efek pengganda (*multiplier effect*), dimana besarnya tergantung pada besaran kecenderungan untuk mengkonsumsi (*marginal propensity to consume, MPC*).

Permintaan agregat dapat dinaikkan dengan cepat hanya melalui kebijakan fiskal (Romer, 2001, Dornbusch *at al.* 2008). Anggaran pemerintah (*government budget*) adalah bagian penting dalam model makroekonomi. Keynes mengatakan apabila perekonomian berada di bawah *full employment*, maka permintaan agregat dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah (G) atau menurunkan pajak (T) (McCann, 2001). Dalam pandangan Keynes, pemerintah mempunyai peran penting untuk mengatur permintaan agregat (AD), dalam rangka mempertahankan atau



menjaga agar perekonomian mendekati tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment level*).

Hasil penelitian tentang kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan oleh Feltenstein dan Iwata (2005) di Cina, Pakasi (2005) di Sulawesi Utara, Haryanto dan Astuty (2009) di Indonesia, Lin dan Liu (2000) di Cina, dan Akhmad at.al. (2012) di Sulawesi Selatan, menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan efisiensi alokasi sumber daya, akumulasi modal, dan sektor swasta merupakan kunci yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Data dan Metodologi

Penelitian ini menggunakan **data panel** 23 kabupaten dan kota tahun (2007-2011). Kabupaten Tana Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja dimasukkan dalam kabupaten induknya yaitu Kabupaten Tana Toraja. Pemilihan rentang waktu data tahun 2006-2011 didasari oleh pertimbangan bahwa pada masa itu otonomi daerah sudah memiliki pengalaman selama lima tahun. Data yang digunakan meliputi data fiskal kabupaten dan kota yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan data perekonomian kabupaten dan kota berupa, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tenaga kerja, pengangguran, kemiskinan, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

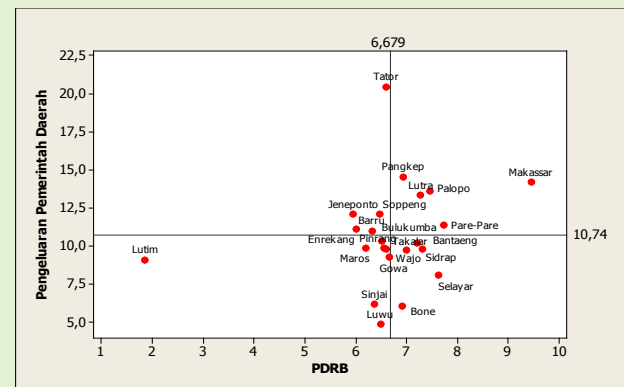
Penelitian ini menggunakan analisis *Pearson correlation* untuk mengetahui pola hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan BDRB, pengurangan pengangguran, dan kemiskinan. Di samping itu, juga digunakan model analisis salib sumbu, guna mengetahui efektifitas pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan BDRB, pengurangan pengangguran, dan kemiskinan pada masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil Penelitian

Pada kesempatan ini penulis menganalisis efektifitas pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan PDRB, angka pengangguran, dan kemiskinan, serta efektifitas pertumbuhan PDRB terhadap kemiskinan kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menarik karena dengan gambaran ini memungkinkan untuk mengetahui posisi masing-masing kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Efektivitas Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Hasil analisis *Pearson correlation* menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan belanja pemerintah daerah berpengaruh positif dan nyata terhadap rata-rata pertumbuhan produk domestik regional bruto yaitu 0.205 pada periode tahun 2006-2011. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan belanja pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan PDRB di daerahnya. Untuk jelasnya pola hubungan antara persentase rata-rata pertumbuhan belanja pemerintah daerah tahun 2006-2011 terhadap persentase rata-rata pertumbuhan produk domestik regional bruto dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1.

Pola Hubungan antara Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan PDRB

Gambar 1 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2006-20011 terdapat 5 kabupaten/kota yang berada pada kuadran I kondisi terbaik dalam arti bahwa persentase kenaikan pengeluaran pemerintah sebanding dengan persentase pertumbuhan PDRB yaitu; kota Makassar, Palopo, Pare-pare, Kabupaten Pangkep dan Luwu Utara. Lima kabupten berada pada kuadran empat yaitu; Kabupaten Takalar, Bantaeng, Sidenreng Rappang, Selayar dan Bone

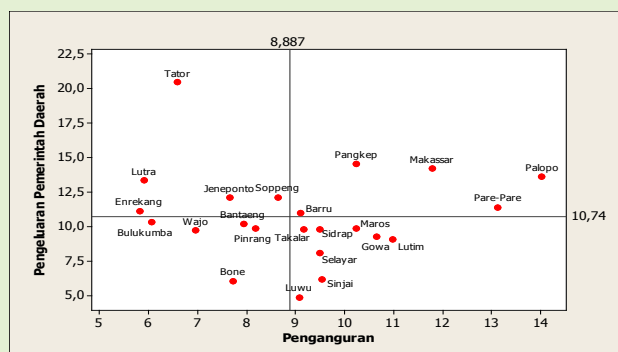
Gambar 1 juga menunjukkan bahwa terdapat delapan kabupaten yang berada pada kuadran III yaitu Kabupaten; Luwu, Sinjai, Gowa, Wajo, Maros, Pinrang, Takalar, dan Luwuk Timur. Kondisi pada kuadran III menunjukkan bahwa persentase kenaikan belanja pemerintah relatif kecil sebanding dengan persentase kenaikan PDRB yang juga relatif kecil.

Sementara pada kudran II terdapat 4 kabupaten yaitu; Bulukkumba, Barru, Soppeng, Jeneponto, dan Tana Toraja. Kondisi pada kuadran II menunjukkan

bahwa prosentase belanja pemerintah cukup tinggi, namun pertumbuhan PDRB relatif kecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa, efektifitas belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada empat kabupaten tersebut relatif kurang baik, sehingga perlu dilakukan evaluasi yang mendalam tentang proporsi belanja yang dianggap efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Efektivitas Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pengangguran

Hasil analisis *Pearson correlation* menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan belanja pemerintah daerah berpengaruh negatif namun tidak nyata terhadap rata-rata pengangguran yaitu $-0,031$ pada periode tahun 2006-2011. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan belanja pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat menurunkan angka pengangguran kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk jelasnya pola hubungan antara persentase rata-rata pertumbuhan belanja pemerintah daerah tahun 2006-2011 terhadap persentase rata-rata penurunan angka pengangguran dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pola Hubungan antara Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Daerah dengan Angka Pengangguran

Gambar 2 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2006-2011 terdapat lima kabupaten yang berada pada kuadran II kondisi terbaik dalam arti bahwa persentase kenaikan pengeluaran pemerintah berbanding terbalik dengan persentase angka pengangguran yaitu; Kabupaten Tona Toraja, Luwu Utara, Enrekang, Jeneponto dan Soppeng. Juga terdapat Lima kabupten yang berada pada kuadran III yaitu; Kabupaten Bulukumba, Wajo, Bone, Bantaeng, dan Pirang. Kuadran III dengan kondisi dimana di daerah angka pengangguran yang cukup rendah, sementara pertumbuhan pengeluaran

pemerintah daerah relatif kecil dibanding dengan daerah lainnya.

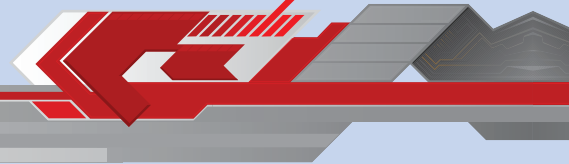
Pada kuadran IV terdiri atas 8 kabupaten yaitu; Kabupaten Luwu, Sinjai, Selayar, Takalar, Sidenreng Rappang, Maros, Gowa, dan Luwu Timur. Daerah yang berada pada kuadran ini menunjukkan bahwa angka pengangguran yang ada cukup tinggi dan pertumbuhan pengeluaran pemerintah relatif kecil, dalam kondisi seperti dibutuhkan peran pihak swasta dan penambahan pengeluaran pemerintah dalam upaya untuk menyerap lapangan kerja.

Kondisi terburuk pada kuadran I terdiri atas 5 kabupaten dan kota yaitu; Kota Makassar, Palopo, dan Pare-pare, serta Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Barru. Pada kuadran I ini pertumbuhan pengeluaran pemerintah cukup tinggi dibanding daerah lainnya namun angka pengangguran tetap tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan pengeluaran pemerintah di daerah tersebut tidak dapat menurunkan angka pengangguran yang ada di daerahnya.

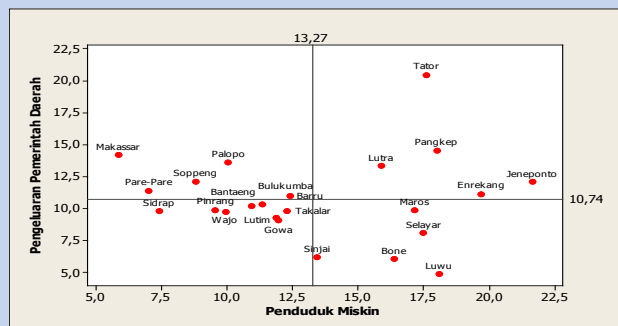
Kota Makassar, Palopo, dan Pare-pare memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi dibanding dengan daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung mencari pekerjaan di kota. Mengingat ketiga daerah itu adalah merupakan daerah kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara Kabupaten Pangkep dan Barru adalah dua kabupaten yang berlokasi sangat dekat dengan Kota Makassar. Hal ini mungkin disebabkan karena tidak sedikit penduduk yang mengadu nasib mencari pekerjaan di kota, sehingga pengangguran di kota cukup tinggi.

Efektivitas Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Kemiskinan

Hasil analisis *Pearson correlation* menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan belanja pemerintah daerah berpengaruh negatif dengan rata-rata angka kemiskinan yaitu $-0,010$ pada periode tahun 2006-2011. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan belanja pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat menurunkan angka kemiskinan kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk jelasnya pola hubungan antara persentase rata-rata pertumbuhan belanja pemerintah daerah tahun 2006-2011 terhadap persentase rata-rata penurunan angka kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2006-2011 terdapat lima kabupaten yang berada pada kuadran I kondisi terburuk dalam arti bahwa persentase kenaikan pengeluaran pemerintah berbanding lurus dengan persentase angka kemiskinan yaitu; Kabupaten Tana Toraja, Luwu Utara, Enrekang, Jeneponto dan Pangkajene Kepulauan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah daerah terhadap kemiskinan relatif kurang. Juga terdapat Lima kabupten yang berada pada kuadran IV yaitu; Kabupaten Luwu, Selayar, Bone, Sinjai, dan Maros. Kuadran IV dengan kondisi dimana di daerah tersebut angka kemiskinan yang cukup tinggi, sementara pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah relatif kecil dibanding dengan dengan daerah lain.



Gambar 3. Pola Hubungan antara Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Daerah dengan Angka Kemiskinan

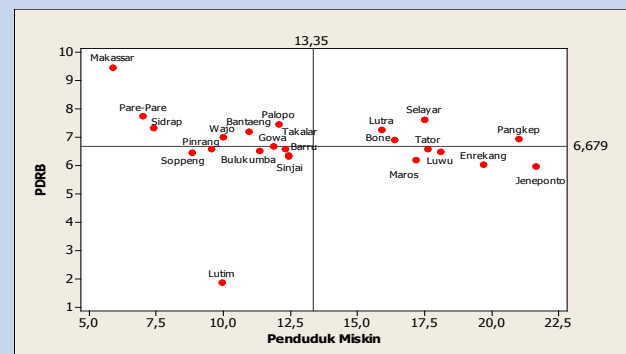
Pada kuadran tiga terdiri atas 8 kabupaten yaitu; Kabupaten Gowa, Takalar, Barru, Luwu Timur, Bantaeng, Wajo, Pinrang, Sidenreng Rappang. Daerah yang berada pada kuadran ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan yang ada relatif kecil dan pertumbuhan pengeluaran pemerintah juga relatif kecil dibanding daerah lainnya.

Kondisi terbaik pada kuadran II terdiri atas 5 kabupaten dan kota yaitu; Kota Makassar, Palopo, dan Pare-pare, serta Kabupaten Soppeng dan Bulukumba. Pada kuadran II ini pertumbuhan pengeluaran pemerintah cukup tinggi dibanding daerah lainnya dan angka kemiskinan cukup kecil, hal tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di daerah cukup efektif dalam menurunkan angka kemiskinan yang ada di daerahnya.

Hubungan Pertumbuhan PDRB terhadap Kemiskinan

Hasil analisis *Pearson correlation* menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh negatif namun tidak nyata

terhadap rata-rata angka kemiskinan yaitu -0,160 pada periode tahun 2006-2011. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan PDRB belum sepenuhnya dapat menurunkan angka kemiskinan kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk jelasnya pola hubungan antara persentase rata-rata pertumbuhan PDRB tahun 2006-2011 terhadap persentase rata-rata penurunan angka kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 4.

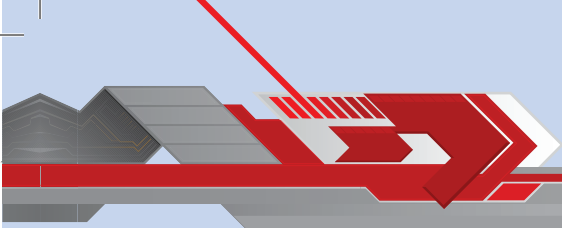


Gambar 4. Pola Hubungan antara Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Daerah dengan Angka Kemiskinan

Gambar 4 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2006-2011 terdapat empat kabupaten yang berada pada kuadran I kondisi terburuk dalam arti bahwa persentase pertumbuhan PDRB berbanding lurus dengan persentase angka kemiskinan yaitu; Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Selayar, Luwu Utara dan Bone. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB di daerah tersebut tidak berkualitas dalam bahwa pertumbuhan PDRB tidak dapat menurunkan angka kemiskinan secara nyata, dengan kata lain terjadi ketimpangan dalam pembangunan ekonomi. Juga terdapat Lima kabupten yang berada pada kuadran IV yaitu; Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, Luwu, Jeneponto, dan Maros. Kuadran IV dengan kondisi dimana di daerah tersebut memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi, sementara pertumbuhan PDRB relatif kecil dibanding dengan dengan daerah lain.

Pada kuadran tiga terdiri atas 7 kabupaten yaitu; Kabupaten Pinrang, Soppeng, Bulukumba, Sinjai, Barru, Gowa, dan Luwu Timur. Daerah yang berada pada kuadran ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan yang ada relatif kecil dan pertumbuhan PDRB juga relatif kecil dibanding daerah lainnya.

Kondisi terbaik pada kuadran II terdiri atas 6 kabupaten dan kota yaitu; Kota Makassar, Palopo, dan Pare-pare, serta Kabupaten Bataeng, Wajo, dan Sidenreng Rappang.



Pada kuadran II ini pertumbuhan PDRB cukup tinggi dibanding daerah lainnya dan angka kemiskinan cukup kecil, hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut lebih berkualitas dibanding dengan daerah lainnya.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Kesimpulan

1. Pertumbuhan rata-rata belanja pemerintah daerah berpengaruh positif dan nyata terhadap pertumbuhan rata-rata produk domestik regional bruto pada periode tahun 2006-2011 pada Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan belanja pemerintah daerah dapat mendorong meningkatnya pertumbuhan PDRB di daerahnya.
2. Pertumbuhan rata-rata belanja pemerintah daerah berpengaruh negatif namun tidak nyata terhadap pengangguran untuk pada periode tahun 2006-2011. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan belanja pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat menurunkan angka pengangguran kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Ditemukan pula bahwa Kota Makassar, Pare-pare, dan Palopo adalah tiga kota dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi meskipun memiliki pertumbuhan belanja pemerintah yang cukup tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ada kecenderungan bahwa para pencari kerja lebih memilih bertaruh mencari pekerjaan di kota-kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pertumbuhan rata-rata belanja pemerintah berpengaruh negatif namun tidak nyata terhadap rata-rata angka kemiskinan untuk periode tahun 2006-2011 di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan belanja pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat menurunkan angka kemiskinan kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pertumbuhan rata-rata produk domestik regional bruto berpengaruh negatif terhadap rata-rata angka kemiskinan untuk periode tahun 2006-2011 di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan PDRB belum sepenuhnya dapat menurunkan angka kemiskinan kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Implikasi Kebijakan

1. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, maka pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi tentang sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang ada di daerahnya, dan selanjutnya menetapkan skala prioritas untuk pengembangan pembangunan kedepan.
2. Untuk dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di daerahnya, maka pemerintah daerah perlu membangun infrastruktur dan lebih menciptakan iklim usaha yang sehat, guna menarik para investor untuk menanamkan modal di daerahnya, dengan lebih mengutamakan investor yang padat karya.
3. Untuk dapat mengurangi angka kemiskinan di daerahnya, maka dibutuhkan keberpihakan yang lebih dari pemerintah daerah. Keberpihakan yang dimaksud dapat berupa pembangunan infrastruktur pada daerah-daerah yang menjadi kantong kemiskinan dan melakukan program pembedayaan secara berkesinambungan.

Daftar Pustaka

- Akhmad, N.A. Achsani, M. Tambunan, S.A. Mulyo. 2012. Impact of Fiscal Policy on the Agricultural Development in an Emerging Economy: Case Study from the South Sulawesi, Indonesia. *International Research Journal of Finance and Economics*. 96:101-112.
- Cullis, J.G. and P.R. Jones. 1992. *Public Finance and Public Choice*. McGraw Hill. Singapore.
- Dornbursh, R., S. Fisher, and R. Startz. 2008. *Macroeconomics*. Ten Edition. Mc Graw – Hill Book Company, Tokyo.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. 2007. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2028*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Makassar
- Felstenstein, A. and S. Iwata. 2005. Decentralization and macroeconomic performance in China: Regional Autonomy Has its Costs. *Journal of Development Economics*. 76:481-501.
- Haryanto, J.T., dan E.S. Astuty. 2009. Desentralisasi Fiskal dan Penciptaan Stabilitas Keuangan Daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*. 13 (1): 51-65.

- 
- Lin, J.Y. and Z. Liu. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. *Economic Development and Cultural Change*. 49(1):1-21.
- McCann, P. 2001. *Urban and Regional Economics*. Oxford University Press Inc. New York.
- Muhammad, M. 2004. *Kebijakan Fiskal di Masa Krisis 1997: Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Kompas, Jakarta.
- Musgrave, R. A. and Musgrave, P. B. 1991. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Rasyid M.R. 1998. Desentralisasi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah: dalam Kumpulan Karangan. *Pembangunan Administrasi di Indonesia*. Disunting Achmad Sjihabuddin. LP3ES, Jakarta.
- Romer, D. 2001. *Advanced macroeconomics*, second edition, McGraw-Hill Book Company Co, Singapore.
- Samuelson P.A and W.D. Nordhaus. 2005. *Economics*. Eighteenth Edition. McGraw-Hill, New York.
- Simanjuntak, R. 2002. *Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal dan Optimasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Working Paper. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Susiyati, B.H. 2007. *Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia*. Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- World Bank. 2007. *Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Daerah: Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007*. <http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/226271-1168333550999>